JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 11 November 2026, pp 9944-9954
E-ISSN 2829-7334
DOI: 10.58344/locus.v5i11.6421

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Adaptasi Kontekstual dalam Pencegahan Kekerasan Remaja Berbasis Komunitas: Studi Kasus Eksploratif di Manggarai, Jakarta

Dewi Lusiana, Natalia Widiasih Raharjanti, Muhammad Ramaditya, Annisa Parastry*, Eliyani Noor, Sello Naufal Anugrah, Ravel Jerrico Dipodiputro
Universitas Indonesia, Indonesia
Email : praditaannisa7@gmail.com*

Keywords:
Adolescent Violence; Brawls; Social Ecological Model; Stakeholder Engagement; Contextual Adaptation Case Studies.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

Group-based youth violence is a multilevel problem that requires a response across families, communities, educational institutions, and security forces. This study explores changes in community needs, target group reach, stakeholder involvement, and adaptation needs in the implementation of brawl prevention programs in Manggarai, Jakarta. The study uses exploratory qualitative case studies. Social Ecological Model (SEM) is used as the main theoretical lens to understand the position of factors and actors at various ecological levels, while collaborative governance, stakeholder engagement, contextual fit, and implementation adaptation literature is used to help interpret implementation dynamics. Qualitative data from media reports on the history of brawls in Manggarai and field observations were analyzed thematically, while limited demographic data from the pretest were used as supporting information to examine the reach of participants. The analysis showed three main patterns, namely, changes in perceptions of the priority of security issues according to the authorities, actual participants who were dominated by adults even though adolescents were the main targets, and the role of local gatekeepers who opened access and participated in shaping the composition of participants. The available pretest records did not include the target group of adolescents aged 13-18 years. The findings suggest that the implementation of community programs needs to reassess the relevance of the problem, the affordability and representation of the targets, the function of stakeholders, and the appropriateness of the intervention when changes or new information arise during implementation.

Kata Kunci:
Kekerasan Remaja; Tawuran; *Social Ecological Model; Stakeholder Engagement*; Adaptasi Kontekstual Studi Kasus.

Abstrak

Kekerasan remaja berbasis kelompok merupakan persoalan multilevel yang memerlukan respons lintas keluarga, komunitas, institusi pendidikan, dan aparat keamanan. Penelitian ini mengeksplorasi perubahan kebutuhan komunitas, jangkauan kelompok sasaran, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kebutuhan adaptasi dalam pelaksanaan program pencegahan tawuran di Manggarai, Jakarta. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif eksploratif. *Social Ecological Model* (SEM) digunakan sebagai lensa teoretis utama untuk memahami posisi faktor dan aktor pada berbagai tingkat ekologis, sedangkan literatur *collaborative governance, stakeholder engagement, contextual fit,* dan *implementation adaptation* digunakan untuk membantu menafsirkan dinamika implementasi. Data kualitatif dari

pemberitaan media mengenai riwayat tawuran di Manggarai dan observasi lapangan dianalisis secara tematik, sedangkan data demografis terbatas dari pretest digunakan sebagai informasi pendukung untuk memeriksa jangkauan peserta. Analisis menunjukkan tiga pola utama, yaitu, perubahan persepsi terhadap prioritas masalah keamanan menurut aparat, peserta aktual yang didominasi orang dewasa meskipun remaja merupakan sasaran utama, serta peran gatekeeper lokal yang membuka akses sekaligus ikut membentuk komposisi peserta. Catatan pretest yang tersedia tidak mencakup kelompok sasaran remaja usia 13-18 tahun. Temuan menunjukkan bahwa implementasi program komunitas perlu menilai kembali relevansi masalah, keterjangkauan dan representasi sasaran, fungsi stakeholder, serta kesesuaian intervensi ketika muncul perubahan atau informasi baru selama implementasi.

PENDAHULUAN

Kekerasan remaja merupakan persoalan sosial multidimensional karena konsekuensinya tidak berhenti pada individu yang terlibat, melainkan juga dapat memengaruhi kesehatan, pendidikan, hubungan keluarga, dan rasa aman komunitas. Literatur menunjukkan bahwa perilaku kekerasan terbentuk melalui interaksi antara karakter individual dan lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman sebaya, sekolah, serta kondisi komunitas (Bushman et al., 2016; Hoeve et al., 2009; Lösel & Farrington, 2012). Karena itu, kekerasan remaja tidak memadai apabila dipahami hanya sebagai kenakalan individual. Pencegahannya memerlukan pemahaman terhadap faktor risiko dan protektif pada beberapa tingkat sekaligus.s

Dalam konteks Indonesia, tawuran memperlihatkan dengan jelas dimensi kolektif yang disebutkan tersebut. Solidaritas kelompok, tekanan teman sebaya, sejarah konflik, kontrol perilaku, lingkungan keluarga, dan norma sosial dapat saling memperkuat keterlibatan remaja dalam bentrokan (Malihah et al., 2014; Isnawan, 2023). Dalam hal ini, pendekatan hukum tetap diperlukan di samping juga pendidikan, penguatan keterampilan sosial, pembinaan keluarga, dan kolaborasi dengan sekolah serta kepolisian (Luthfiyana et al., 2025; Yunita et al., 2023). Dengan demikian, pertanyaan praktis dalam pencegahan kekerasan remaja tidak hanya terkait siapa yang berisiko, tetapi juga aktor mana yang perlu dilibatkan, bagaimana kelompok sasaran dijangkau, dan apakah materi intervensi tetap sesuai dengan kondisi yang berkembang.

Manggarai, Jakarta, menjadi konteks yang relevan untuk melihat persoalan yang dijelaskan di atas karena wilayah ini memiliki riwayat konflik antarkelompok dan tawuran yang berulang dalam pemberitaan media. Pemberitaan pada 2019 mendokumentasikan bentrokan antara warga Manggarai Selatan dan Menteng Tenggulun, sedangkan laporan pada 2025 dan awal 2026 kembali mencatat tawuran di kawasan Manggarai (Devi, 2019; Al Farisi, B., & Farisa, 2025) dan (Putri, 2026). Atas dasar konteks tersebut, program pengabdian masyarakat "Edukasi Pencegahan Tawuran Remaja melalui Pendekatan Literasi Sosial dan Kesadaran Hukum di Manggarai" ini dirancang dengan remaja sebagai penerima manfaat utama.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara akademisi, aparat kepolisian, dan tokoh masyarakat, dengan rangkaian kegiatan yang mencakup edukasi hukum, dialog mengenai isu keamanan, penguatan manajemen diri, pengambilan keputusan dalam situasi konflik, serta pengembangan keterampilan sosial. Dalam rancangan awal, program juga melibatkan orang

tua, RT/RW, kepolisian, sekolah, organisasi pemuda, dan perguruan tinggi sebagai aktor pendukung yang berperan pada tingkat ekologis yang berbeda.

Pelaksanaan program menghadirkan kondisi yang tidak sepenuhnya sama dengan desain awal. Berdasarkan data lapangan yang tersedia, sekitar 50 orang hadir dan peserta didominasi orang dewasa, sementara remaja yang sejak awal menjadi sasaran utama hadir dalam proporsi lebih kecil. Mobilisasi peserta sangat terbantu oleh Ketua RW sebagai penghubung dengan warga. Pada saat yang sama, pihak kepolisian menyampaikan bahwa tawuran dipersepsikan jauh berkurang dibanding sekitar dua tahun sebelumnya, sedangkan menurut informasi dari beberapa tokoh pemuda, narkoba dan pencurian kendaraan bermotor dinilai justru lebih menonjol dalam beberapa waktu terakhir. Informasi ini tidak digunakan untuk menyimpulkan perubahan objektif angka kriminalitas atau efek program, tetapi menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebutuhan lokal dapat berubah antara tahap perencanaan dan implementasi.

Kondisi tersebut menggeser pertanyaan dari sekadar faktor penyebab tawuran menuju persoalan implementasi: apakah masalah yang ditangani masih sesuai dengan kebutuhan lokal, apakah kelompok sasaran benar-benar terjangkau, apakah stakeholder memainkan fungsi yang relevan, dan apakah bentuk intervensi masih cocok dengan peserta serta konteks aktual. Terkait hal ini, *literature collaborative governance* menunjukkan bahwa kehadiran banyak aktor belum identik dengan kolaborasi yang efektif (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012), sedangkan *implementation science* menekankan bahwa implementasi memerlukan perhatian terhadap konteks, kesesuaian, dan adaptasi selama proses berlangsung (Chambers et al., 2013; Skivington et al., 2021; von Thiele Schwarz et al., 2019). Literatur terbaru tentang *stakeholder engagement* juga menekankan bahwa pemetaan aktor, tujuan keterlibatan, pendekatan, kualitas keterlibatan, dan luaran perlu dipikirkan sepanjang proses implementasi, bukan hanya pada tahap awal (Potthoff et al., 2023).

Literatur tersebut di atas telah membahas *stakeholder engagement*, *contextual fit* dan *adaptation*, tetapi aspek-aspek tersebut sering diperlakukan sebagai persoalan yang berbeda. Dalam praktik program berbasis komunitas, pelaksana perlu membaca secara bersamaan apakah masalah yang diprioritaskan masih relevan, kelompok yang dimaksud benar-benar terjangkau, stakeholder menjalankan fungsi yang dibutuhkan, dan intervensi tetap sesuai ketika kondisi komunitas berubah. Kesenjangan penelitian ini karena itu terutama bersifat implementatif, yang artinya masih diperlukan bukti empiris mengenai bagaimana ketidaksesuaian antara rancangan dan kondisi aktual muncul dalam satu proses program komunitas serta bagaimana ketidaksesuaian tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan reassessment dan adaptasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara perubahan kebutuhan masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kebutuhan adaptasi dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan remaja berbasis komunitas di Manggarai. Tiga pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) kebutuhan dan persoalan keamanan remaja apa yang teramati atau dikemukakan selama pelaksanaan; (2) bagaimana keterlibatan stakeholder membentuk implementasi program; dan (3) ketidaksesuaian apa yang muncul antara rancangan awal program dan kondisi implementasi aktual, serta kebutuhan adaptasi apa yang ditunjukkan oleh ketidaksesuaian tersebut. Penelitian ini tidak mengevaluasi

efektivitas program atau menguji penurunan tawuran. Kontribusi penelitian ini bersifat empiris dan integratif, yaitu menunjukkan bagaimana perubahan konteks, jangkauan sasaran, fungsi stakeholder, dan kesesuaian intervensi berinteraksi selama implementasi program komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kasus kualitatif eksploratif tentang kegiatan pencegahan kekerasan remaja pada 4 September 2026 di RT 009/RW 01, Manggarai, Jakarta. Studi tidak bertujuan menguji hubungan kausal, mengukur efektivitas, atau menggeneralisasi hasil.

Program awalnya menargetkan 60 remaja, 10 aparat/tokoh lingkungan, dan 10 orang tua/perwakilan sekolah, namun realisasinya sekitar 50 orang hadir dan didominasi orang dewasa — remaja sebagai sasaran utama justru terjangkau lebih sedikit. Rekrutmen dilakukan lewat Ketua RW dan gatekeeper lokal.

Data dikumpulkan dari pemberitaan media soal riwayat tawuran di Manggarai (sebagai konteks, bukan statistik kriminalitas) dan observasi lapangan atas komposisi peserta, interaksi *stakeholder*, serta *gap* desain-implementasi. Data pretest (18 responden, usia 21–75 tahun, bukan remaja) hanya dipakai deskriptif untuk melihat profil jangkauan, tanpa analisis skor atau outcome.

Analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) menghasilkan empat tema: relevansi masalah dengan konteks lokal, jangkauan/representasi kelompok sasaran, peran stakeholder, dan kesesuaian intervensi dengan peserta aktual. Keabsahan dijaga lewat triangulasi sumber dan kesadaran akan bias posisi tim sebagai fasilitator sekaligus observer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Persepsi Masalah dan Relevansi Kontekstual

Program dirancang dengan tawuran sebagai masalah utama berdasarkan riwayat konflik lokal yang didokumentasikan dalam pemberitaan media (Devi, 2019; Al Farisi & Farisa, 2025; Putri, 2026). Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa tawuran merupakan isu yang berulang, tetapi penjelasan ini tidak digunakan untuk menghitung perubahan frekuensi atau tren kriminalitas. Pada saat kegiatan, pihak kepolisian menyampaikan bahwa frekuensi tawuran dipersepsikan jauh menurun dibanding sekitar dua tahun sebelumnya setelah berbagai upaya penanganan dan penyuluhan. Pada saat yang sama, narkoba dan pencurian kendaraan bermotor disebut lebih menonjol. Pernyataan tersebut juga tidak membuktikan perubahan objektif tingkat kejahatan. Nilainya terletak pada fungsi kontekstual, yaitu salah satu aktor yang memiliki pengetahuan keamanan lokal memandang prioritas masalah secara berbeda dari asumsi yang menjadi dasar awal program.

Temuan ini menunjukkan adanya gap temporal antara masalah yang menjadi dasar perencanaan dan persepsi kebutuhan yang muncul saat pelaksanaan. Fokus pada tawuran tetap dapat dipertanggungjawabkan secara historis, tetapi relevansinya tidak boleh diasumsikan tetap sama tanpa validasi ulang. Chambers et al. (2013) dan Skivington et al. (2021) menunjukkan bahwa konteks merupakan bagian aktif dari implementasi intervensi, sedangkan Blanchard dan Livet (2020) menempatkan kesesuaian dengan kebutuhan sebagai salah satu pertanyaan awal dalam menilai fit. Dalam kasus Manggarai, kondisi tersebut memerlukan reassessment, yaitu apakah pencegahan tawuran tetap menjadi prioritas utama, perlu diperluas menjadi pencegahan

perilaku berisiko remaja, atau perlu disinergikan dengan isu keamanan lain berdasarkan data yang lebih kuat.

Jangkauan dan Representasi Sasaran: Remaja sebagai Target, Orang Dewasa sebagai Peserta Dominan

Perbedaan paling nyata antara desain dan implementasi terdapat pada komposisi peserta. Remaja direncanakan sebagai penerima manfaat utama, tetapi observasi lapangan menunjukkan bahwa peserta aktual didominasi orang dewasa. Data pretest memberikan bukti deskriptif tambahan atas pola tersebut. Sebagai data pendukung, 18 catatan respons pretest yang tersedia menunjukkan usia 21-75 tahun, dengan rerata 42,8 tahun dan median 41 tahun; tidak terdapat satu pun respons dari kelompok sasaran remaja usia 13-18 tahun. Sembilan catatan respons juga menyatakan adanya jabatan atau peran komunitas, dengan jawaban yang mencakup RT, ketua atau sekretaris RT, PKK, dan FKDM. Profil ini menunjukkan bahwa instrumen yang semula disiapkan untuk remaja lebih banyak menjangkau aktor dewasa dan komunitas.

Dengan demikian, gap antara target dan peserta aktual tidak hanya tampak dari observasi lapangan, tetapi juga didukung oleh profil catatan respons pretest: program dapat dilaksanakan dan warga dapat dimobilisasi, tetapi kelompok utama yang hendak dijangkau belum terwakili sesuai rancangan. Dalam program remaja, gap tersebut penting karena akses tidak hanya berarti jumlah hadir; pengalaman, bahasa, tekanan teman sebaya, serta situasi konflik yang dialami remaja sulit sepenuhnya digantikan oleh representasi orang dewasa (Checkoway, 2011; Ozer, 2017). Potthoff et al. (2023) juga menekankan pentingnya pemetaan stakeholder dan tujuan keterlibatan secara spesifik, karena keberadaan stakeholder yang relevan belum menjamin bahwa kelompok yang ingin didengar telah benar-benar terlibat.

Tetapi dominasi kehadiran orang dewasa dalam kegiatan ini tidak otomatis berarti kegagalan. Keluarga berada pada tingkat interpersonal yang memiliki potensi protektif melalui pengawasan, komunikasi, dan dukungan (Hoeve et al., 2009; Pinquart, 2017). Data karena itu memperlihatkan dua interpretasi yang perlu dipertahankan sekaligus, yaitu jangkauan langsung kepada remaja lebih rendah dari rancangan, tetapi secara ekologis keterlibatan orang tua dapat menjadi aset intervensi. Implikasinya bukan menolak peserta orang tua, melainkan membedakan jalur intervensi untuk remaja dan jalur penguatan keluarga agar fungsi masing-masing lebih jelas.

Gatekeeper Lokal: Akses dan Seleksi

Ketua RW memiliki peran sentral dalam kegiatan ini untuk menghubungkan penyelenggara dengan warga dan membantu mobilisasi peserta. Peran tersebut menunjukkan bahwa implementasi berbasis komunitas bergantung pada aktor yang memiliki legitimasi dan jaringan lokal. Dalam perspektif collaborative governance, kapasitas hubungan semacam ini merupakan sumber daya penting karena penyelenggara eksternal tidak selalu memiliki akses langsung kepada kelompok sasaran (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Pada saat yang sama, gatekeeper-mediated recruitment membawa konsekuensi selektif. Jaringan yang paling mudah dijangkau oleh gatekeeper dapat berbeda dari populasi yang didefinisikan dalam desain program. Dominasi peserta dewasa karena itu dapat dibaca bukan hanya sebagai persoalan "remaja tidak datang", tetapi sebagai kemungkinan hasil interaksi antara desain target dan mekanisme akses. Ketua RW menjalankan fungsi yang sangat sesuai

untuk membuka akses, tetapi mekanisme akses tersebut juga ikut membentuk siapa yang akhirnya hadir. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi rekrutmen perlu dirancang sebagai bagian dari intervensi, bukan sekadar urusan administratif setelah program selesai disusun.

Peran dan Fungsi *Stakeholder Multilevel*

Secara konseptual, program telah mengidentifikasi aktor dari beberapa tingkat ekologis: keluarga, RT/RW, kepolisian, sekolah, organisasi pemuda, dan perguruan tinggi. Konfigurasi ini sesuai dengan asumsi SEM bahwa masalah kekerasan remaja tidak dapat ditangani oleh satu aktor. Tetapi data kasus menunjukkan bahwa keberadaan aktor tidak cukup karena yang menentukan bagi implementasi adalah bagaimana pengetahuan, akses, kewenangan, dan fungsi masing-masing aktor digunakan dalam situasi aktual.

Kepolisian, misalnya, tidak hanya berperan memberi edukasi hukum tetapi juga menyediakan informasi kontekstual mengenai kondisi keamanan. RT/RW tidak hanya memberi dukungan formal tetapi menjadi infrastruktur akses. Orang tua yang awalnya diposisikan sebagai pendukung justru menjadi kelompok peserta dominan. Perubahan fungsi tersebut sejalan dengan gagasan bahwa kolaborasi membutuhkan pemahaman peran dan kapasitas bertindak kolektif, bukan sekadar daftar stakeholder (Bryson et al., 2015; Emerson et al., 2012). Literatur stakeholder engagement juga menekankan perlunya pemetaan yang mempertimbangkan tujuan serta kontribusi aktor pada tahap implementasi yang berbeda (Potthoff et al., 2023).

Kesesuaian Intervensi dengan Konteks dan Kebutuhan Adaptasi

Materi awal dirancang untuk remaja dengan fokus pada tawuran, kesadaran hukum, self-management, pengambilan keputusan, dan keterampilan sosial. Ketika peserta aktual didominasi orang dewasa dan persepsi masalah lokal berubah, kesesuaian materi menjadi pertanyaan implementasi. Materi tentang konsekuensi hukum dan pencegahan konflik tetap relevan, tetapi metode penyampaian, contoh kasus, dan hasil yang diharapkan bagi orang tua berbeda dari intervensi yang secara langsung ditujukan kepada remaja. Dengan demikian, fidelitas terhadap tujuan tidak harus berarti mempertahankan format intervensi secara identik ketika peserta dan konteks berubah.

Penjelasan di atas didukung oleh literatur implementasi. von Thiele Schwarz et al. (2019) menempatkan strategi implementasi sebagai cara untuk mengoptimalkan fit antara intervensi dan konteks, sedangkan Eisman et al. (2022) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kebutuhan sasaran dan materi intervensi dapat menjadi determinan implementasi. Dengan demikian, adaptasi tidak selalu berarti meninggalkan tujuan awal, tetapi dapat digunakan untuk mempertahankan relevansi tujuan melalui perubahan pada metode, contoh, kanal rekrutmen, atau komponen pendukung.

Keseluruhan pola yang diperoleh dari hasil observasi diringkas dalam Tabel 1. Mismatch muncul pada hubungan antarkomponen, bukan hanya pada satu faktor. Karena itu, respons yang paling logis adalah siklus penilaian ulang. Perubahan persepsi masalah membutuhkan validasi ulang kebutuhan; gap target-peserta membutuhkan perbaikan rekrutmen dan ruang partisipasi remaja; perubahan fungsi stakeholder membutuhkan penataan peran aktor; dan ketidaksesuaian materi dengan konteks membutuhkan adaptasi isi maupun metode. Logika ini konsisten dengan literatur sistem dan implementasi yang memandang intervensi sebagai proses yang berinteraksi dengan konteks (Hawe et al., 2009; Chambers et al., 2013).

Tabel 1. Matriks Temuan dan Implikasi Implementasi

Pola kasus	Bukti yang tersedia	Tema analitis	Implikasi implementasi
Perubahan persepsi prioritas	Tawuran disebut menurun; isu lain dinilai lebih menonjol oleh kepolisian.	Relevansi masalah-konteks	Validasi ulang kebutuhan sebelum mempertahankan fokus program.
Gap target-peserta	Remaja target utama; peserta aktual didominasi orang dewasa. Catatan respons pretest yang tersedia berusia 21-75 tahun (median 41) dan tidak mencakup usia 13-18 tahun.	Jangkauan dan representasi sasaran	Perbaiki kanal rekrutmen dan bedakan jalur intervensi remaja-keluarga.
Akses melalui gatekeeper	Ketua RW sangat membantu mobilisasi warga.	Jangkauan sasaran / peran stakeholder	Pertahankan gatekeeper, tetapi lengkapi dengan kanal khusus untuk menjangkau remaja.
Perubahan fungsi aktor	Polisi memberi informasi konteks; orang tua menjadi peserta dominan.	Peran dan fungsi stakeholder	Petakan fungsi, informasi, akses, dan kewenangan setiap aktor.
Kebutuhan adaptasi	Materi dirancang untuk remaja/tawuran; konteks dan peserta aktual berbeda.	Kesesuaian intervensi-konteks	Adaptasi format dan isi berdasarkan reassessment tanpa kehilangan tujuan pencegahan.

Kontribusi Empiris dan Implikasi Praktis

Kontribusi utama penelitian bersifat empiris dan integratif, bukan pembentukan teori baru. SEM membantu mengidentifikasi letak faktor dan aktor pada berbagai tingkat, sementara literatur collaborative governance, stakeholder engagement, contextual fit, dan implementation adaptation membantu menjelaskan dinamika yang muncul selama pelaksanaan. Kasus Manggarai menunjukkan bahwa implementasi program komunitas perlu memperhatikan secara bersamaan empat persoalan: apakah masalah yang diprioritaskan masih relevan dengan kondisi aktual, apakah kelompok sasaran benar-benar terjangkau dan terwakili, apakah stakeholder menjalankan fungsi yang dibutuhkan, dan apakah intervensi tetap sesuai dengan peserta serta konteks aktual.

Nilai analitis kasus ini terletak pada pemahaman mismatch sebagai pemicu pembelajaran implementasi, bukan langsung sebagai bukti kegagalan. Ketidaksesuaian dapat muncul karena konteks berubah, strategi akses menghasilkan komposisi peserta yang berbeda, fungsi stakeholder berkembang selama implementasi, atau materi intervensi tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan peserta aktual. Dengan menghubungkan pola-pola tersebut, penelitian menunjukkan pentingnya reassessment yang berulang agar program dapat mempertahankan relevansinya tanpa harus mempertahankan seluruh bentuk awal intervensi secara kaku.

Secara praktis, program berbasis komunitas perlu memperbarui needs assessment sedekat mungkin dengan waktu pelaksanaan, memvalidasi masalah dengan lebih dari satu sumber, dan membangun strategi rekrutmen yang spesifik untuk target. Untuk program remaja, keterlibatan RT/RW sebaiknya dilengkapi kanal yang lebih dekat dengan remaja, misalnya sekolah, organisasi pemuda, atau kelompok kegiatan lokal. Materi juga perlu bersifat modular

sehingga dapat disesuaikan apabila peserta aktual berbeda dari rencana. Rapat singkat reassessment sebelum kegiatan dapat digunakan untuk menguji empat pertanyaan praktis: apakah masalah masih relevan, apakah target terjangkau, apakah aktor yang dibutuhkan tersedia dan berfungsi, serta apakah intervensi masih cocok dengan konteks.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Interpretasi temuan dibatasi oleh sifat studi kasus tunggal dan sumber data yang terbatas. Bukti mengenai perubahan prioritas masalah keamanan berasal dari persepsi kontekstual kepolisian dan tidak dapat diperlakukan sebagai data tren kriminalitas. Pemberitaan media juga digunakan sebagai dokumentasi kontekstual, bukan sebagai basis penghitungan kejadian atau tren. Observasi dilakukan dalam konteks kegiatan yang juga difasilitasi oleh tim pengabdian sehingga posisi fasilitator-observer dapat memengaruhi apa yang dicatat dan bagaimana peristiwa ditafsirkan. Selain itu, studi tidak memiliki data kualitatif yang kaya dari remaja sebagai kelompok sasaran utama; keterbatasan representasi remaja dalam data pendukung justru menjadi bagian dari temuan mengenai gap antara target dan peserta aktual.

Data pretest hanya digunakan untuk menggambarkan jangkauan peserta karena jumlahnya terbatas. Di samping itu pengisinya bukan kelompok remaja yang menjadi target awal, dan data posttest berpasangan tidak tersedia. Karena itu, skor konstruk tidak digunakan untuk menilai efektivitas atau perubahan perilaku. Keterbatasan tersebut juga berarti bahwa empat tema analitis dalam studi ini tidak dimaksudkan sebagai konstruk yang telah tervalidasi. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan kasus komparatif dan data yang lebih kaya untuk menguji bagaimana perubahan konteks, jangkauan sasaran, fungsi stakeholder, dan kebutuhan adaptasi muncul pada jenis intervensi serta komunitas yang berbeda.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan remaja berbasis komunitas perlu dinilai bukan hanya dari keberadaan faktor multilevel atau banyaknya *stakeholder*, tetapi juga dari bagaimana rancangan program berhadapan dengan kondisi implementasi aktual. Kasus Manggarai memperlihatkan tiga dinamika utama: persepsi masalah keamanan dapat berubah setelah program dirancang, kelompok yang berhasil dijangkau dapat berbeda dari target awal, dan gatekeeper lokal dapat sekaligus menjadi sumber akses serta mekanisme yang ikut membentuk komposisi peserta. Kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan kegagalan program, tetapi menegaskan perlunya reassessment dan adaptasi.

SEM tetap menjadi lensa teoretis utama untuk memahami level faktor dan aktor, sedangkan literatur stakeholder engagement dan implementation science membantu menjelaskan perubahan peran, contextual fit, dan kebutuhan adaptasi. Secara praktis, temuan menunjukkan pentingnya menilai kembali relevansi masalah, keterjangkauan serta representasi sasaran, fungsi stakeholder, dan kesesuaian intervensi dengan konteks aktual melalui siklus *assess* → *design* → *implement* → *observe* → *reassess* → *adapt*. Studi selanjutnya perlu menggunakan data yang lebih kaya, terutama dari remaja sebagai kelompok sasaran utama, serta kasus komparatif untuk memahami kondisi yang membuat mismatch implementasi muncul dan strategi adaptasi yang paling tepat untuk menanganinya.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Dewi Lusiana, Natalia Widiasih Raharjanti, Muhammad Ramaditya: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Annisa Parastry*, Eliyani Noor, Sello Naufal Anugrah, Ravel Jerrico Dipodiputro: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

Al Farisi, B., & Farisa, F. C. (2025). *Tawuran pecah lagi di Manggarai, dendam turun-temurun?*

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Blanchard, C. M., & Livet, M. (2020). Ensuring intervention success: Assessing fit as an overlooked step of the implementation process. Pharmacy Practice, 18(4), 2235. https://doi.org/10.18549/PharmPract.2020.4.2235

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75(5), 647-663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Bushman, B. J., Newman, K., Calvert, S. L., Downey, G., Dredze, M., Gottfredson, M., Jablonski, N. G., Masten, A. S., Morrill, C., Neill, D. B., Romer, D., & Webster, D. W. (2016). Youth violence: What we know and what we need to know. American Psychologist, 71(1), 17-39. https://doi.org/10.1037/a0039687

Chambers, D. A., Glasgow, R. E., & Stange, K. C. (2013). The dynamic sustainability framework: Addressing the paradox of sustainment amid ongoing change. Implementation Science, 8, 117. https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-117

Checkoway, B. (2011). What is youth participation? Children and Youth Services Review, 33(2), 340-345. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.09.017

Devi, R. W. S. (2019, September 5). Tawuran di Manggarai, begini rangkaian kejadiannya. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-4694464/tawuran-di-manggarai-begini-rangkaian-kejadiannya

Eisman, A. B., Palinkas, L. A., Brown, S., Lundahl, L., & Kilbourne, A. M. (2022). A mixed methods investigation of implementation determinants for a school-based universal prevention intervention. Implementation Research and Practice, 3, 1-14. https://doi.org/10.1177/26334895221124962

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Hawe, P., Shiell, A., & Riley, T. (2009). Theorising interventions as events in systems. American Journal of Community Psychology, 43(3-4), 267-276. https://doi.org/10.1007/s10464-009-9229-9

Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I., van der Laan, P. H., Smeenk, W., & Gerris, J. R. M. (2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 37(6), 749-775. https://doi.org/10.1007/s10802-009-9310-8

Isnawan, F. (2023). Kajian kriminologis fenomena tawuran remaja di Indonesia dan penanggulangannya. Gorontalo Law Review, 6(1). https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2694

Lösel, F., & Farrington, D. P. (2012). Direct protective and buffering protective factors in the development of youth violence. American Journal of Preventive Medicine, 43(2 Suppl. 1), S8-S23. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2012.04.029

Luthfiyana, S., Juita, R., Sitompul, S. R., Permata, B. D., & Syafrini, D. (2025). Pendekatan edukatif dan sosial dalam mencegah tawuran di kalangan remaja Kota Padang. Social Empirical, 2(1), 219-228. https://doi.org/10.24036/scemp.v2i1.85

Malihah, E., Maftuh, B., & Amalia, R. (2014). Tawuran pelajar: Solidarity in the student group and its influence on brawl behaviour. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 6(2), 212-221. https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i2.3301

McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. Health Education Quarterly, 15(4), 351-377. https://doi.org/10.1177/109019818801500401

Ozer, E. J. (2017). Youth-led participatory action research: Overview and potential for enhancing adolescent development. Child Development Perspectives, 11(3), 173-177. https://doi.org/10.1111/cdep.12228

Pinquart, M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with externalizing problems of children and adolescents: An updated meta-analysis. Developmental Psychology, 53(5), 873-932. https://doi.org/10.1037/dev0000295

Potthoff, S., Finch, T., Bührmann, L., Etzelmüller, A., van Genugten, C. R., Girling, M., May, C. R., Perkins, N., Vis, C., & Rapley, T. (2023). Towards an Implementation-STakeholder Engagement Model (I-STEM) for improving health and social care services. Health Expectations, 26(5), 1997-2012. https://doi.org/10.1111/hex.13808

Putri, L. M. (2026, January 2). Polisi pastikan tawuran di Manggarai sudah kondusif. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5330860/polisi-pastikan-tawuran-di-manggarai-sudah-kondusif

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. Science, 277(5328), 918-924. https://doi.org/10.1126/science.277.5328.918

Skivington, K., Matthews, L., Simpson, S. A., Craig, P., Baird, J., Blazeby, J. M., Boyd, K. A., Craig, N., French, D. P., McIntosh, E., Petticrew, M., Rycroft-Malone, J., White, M., & Moore, L. (2021). A new framework for developing and evaluating complex interventions: Update of Medical Research Council guidance. BMJ, 374, n2061. https://doi.org/10.1136/bmj.n2061

von Thiele Schwarz, U., Aarons, G. A., & Hasson, H. (2019). The Value Equation: Three complementary propositions for reconciling fidelity and adaptation in evidence-based practice implementation. BMC Health Services Research, 19, 868. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4668-y

Wong, N. T., Zimmerman, M. A., & Parker, E. A. (2010). A typology of youth participation and empowerment for child and adolescent health promotion. American Journal of Community Psychology, 46(1-2), 100-114. https://doi.org/10.1007/s10464-010-9330-0

Yunita, S., Sihombing, G., Rezeki, C. M. S., Rambe, F. A., & Khairunnisa, N. N. S. (2023). Implementasi pendidikan kewarganegaraan: Analisis hak dan kewajiban siswa dalam mencegah kejadian tawuran dan bullying di sekolah SMPN 2 Sunggal. Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, 4(1), 225-233. https://doi.org/10.55583/jkip.v4i1.701